

BAB I

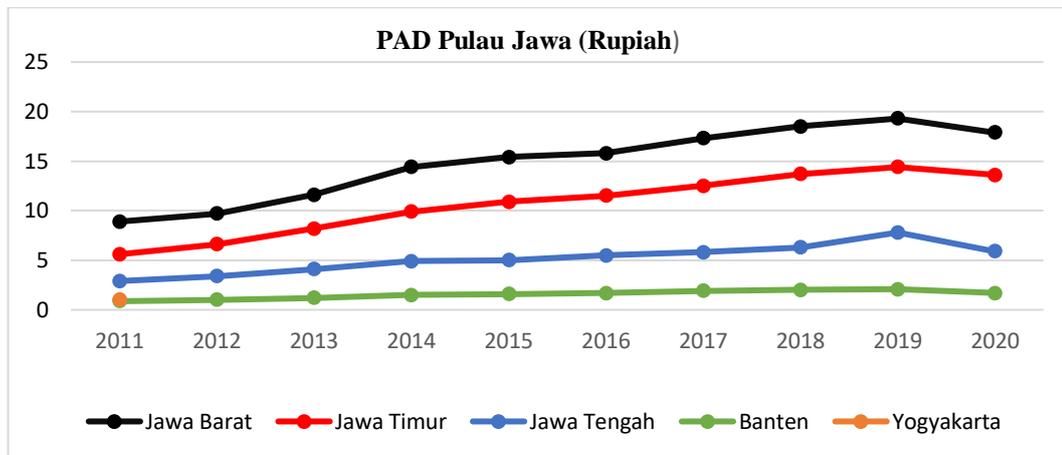
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional diperlukan peran APBD yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah dan pertumbuhan ekonomi, sebab menentukan tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. Ketika suatu daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik, dinyatakan daerah tersebut berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata (Badan Pusat Statistik, 2015).

Pigou dalam bukunya yang berjudul *The Economics of Welfare* pada tahun 1932 mengatakan bahwa PAD dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan barang publik, dimana dengan adanya kebutuhan publik yang optimal seperti sarana dan prasarana yang lengkap, dapat tercipta lapangan kerja baru dan lain-lain yang bersumber dari tergalinya potensi-potensi yang ada disetiap daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan subjektif yang diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan. Jadi, PAD yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Grafik 1 menunjukkan penerimaan PAD 6 Provinsi di Pulau Jawa:

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Rupiah)



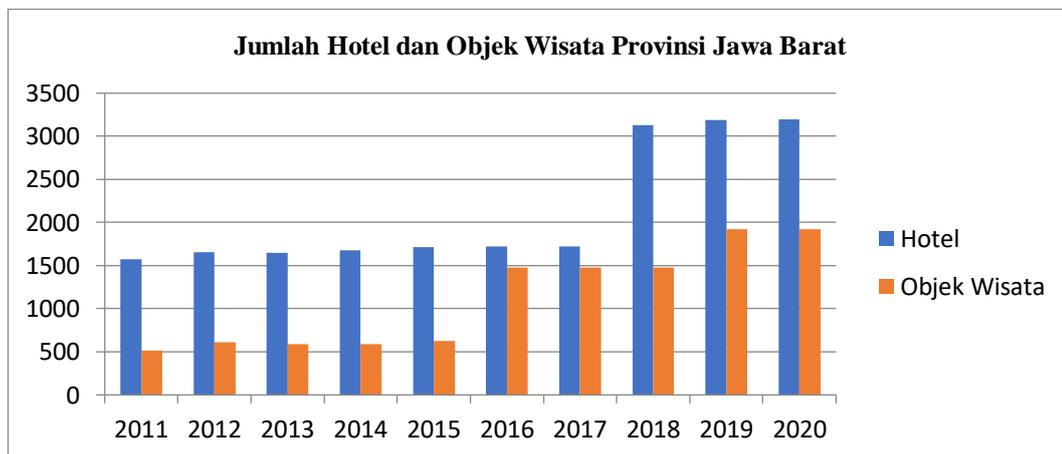
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada grafik 1 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau penyumbang PAD terbesar di Indonesia, salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai peran terhadap PAD nya ialah Provinsi Jawa Barat. Terpilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian karena dapat dikatakan provinsi yang mempunyai banyak potensi dalam Pendapatan Asli Daerah, salah satunya didominasi oleh pajak. Populasi yang cukup tinggi yang tersebar di beberapa kota dan perkampungan Provinsi Jawa Barat juga memungkinkan semakin banyak pula pajak yang akan didapatkan oleh daerah untuk kesejahteraan daerah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi tersebut berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia karena telah memanfaatkan potensi daerahnya secara optimal.

Usaha-usaha seperti akomodasi hotel, kuliner, transportasi, iklan dan lain-lain merupakan salah satu sektor yang memengaruhi PAD karena dapat meningkatkan pajak di Provinsi Jawa Barat. Akomodasi hotel dan objek-objek wisata pun menjadi jenis usaha terbesar di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal baik dari segi pelayanan maupun perawatan sehingga penerimaan pajak daerah masih banyak yang belum sesuai target. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya akses teknologi salah satunya ialah *smartphone* berbasis internet sehingga kehadiran fisik sudah banyak tergantikan oleh digital yang berpengaruh pada ada tidaknya suatu bentuk usaha tetap (BUT), karena menurut Direktur Perpajakan Internasional DJP Kementerian Keuangan jika tidak ada BUT maka

suatu negara maupun daerah tidak bisa memungut pajak atas laba usaha yang ada, karena BUT dikaitkan dengan kehadiran fisik sehingga perilaku penyimpangan petugas dan masyarakat yang masih menghindari pajak juga menjadi tantangan dalam perpajakan yang membuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa inovasi terkait pemungutan yang lebih *modern* seperti *e-retribusi* untuk mencegah kebocoran pajak, pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, penyempurnaan administrasi serta peningkatan fasilitas publik yang dapat mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD karena kesadaran wajib pajak yang meningkat (Veronika, 2018). Berikut adalah grafik yang menunjukkan banyaknya hotel dan objek wisata di Provinsi Jawa Barat :

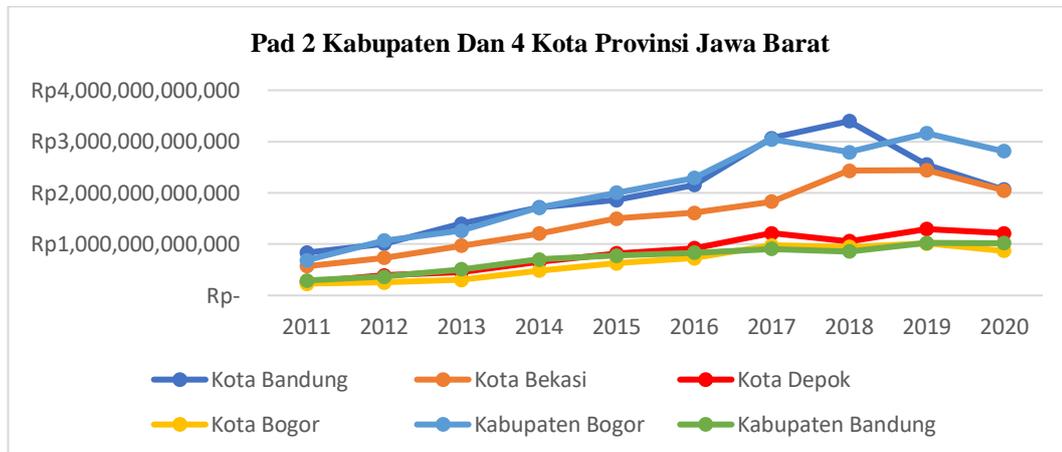
Grafik 2. Pertumbuhan Jumlah Hotel dan Objek Wisata di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020 (Unit)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Pada grafik diatas, ditahun 2018 banyaknya akomodasi hotel meningkat sebanyak 1.410, hal ini berhubungan dengan bertambahnya objek wisata di Provinsi Jawa Barat sebanyak 852 sejak tahun 2016 karena indentitas Provinsi Jawa Barat saat ini dikenal dengan provinsi pariwisata sehingga semakin banyaknya tempat hiburan maupun hotel yang terdapat di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat. Bertambahnya objek wisata atau adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah dapat mendorong penduduk/badan usaha untuk membangun sebuah usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata tersebut, salah satunya adalah mendirikan sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat pariwisata tersebut serta sudah sesuai dengan aturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3. Pertumbuhan Penerimaan PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020 (Rupiah)



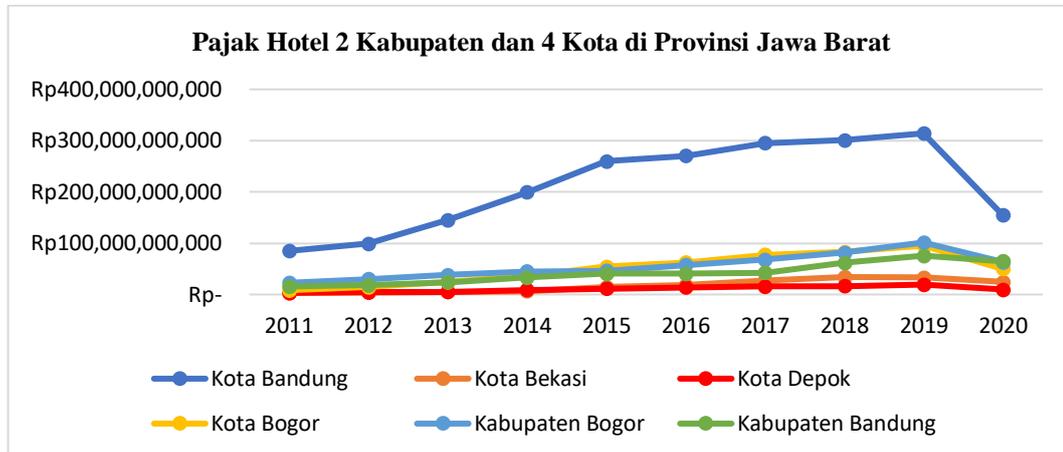
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Besarnya PAD di Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh pajak dan retribusi dapat tergambarkan di 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat di grafik 3. Pada grafik tersebut menjelaskan di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapati kenaikan PAD di tiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh kerja keras dan inovasi dari pemerintah setempat untuk meningkatkan potensi di Provinsi Jawa Barat serta memberi pelayanan yang tepat untuk masyarakat. Namun, ditahun 2018 dan 2020 PAD mengalami penurunan hampir diseluruh daerah. Penyebab terjadinya penurunan karena sampai tahun 2018, Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki kemandirian fiskal yang cukup baik, sehingga pendapatan PAD masih lebih kecil dari pendapatan dana transfer. Masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat terhadap pendanaan dan banyaknya desa tertinggal juga termasuk salah satu faktor penyebab turunnya PAD di 2018. Lalu tahun 2020, penurunan PAD di seluruh daerah disebabkan oleh krisis ekonomi global yang secara umum melanda Indonesia akibat atau dampak global dari Pandemi Covid 19 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2018).

Meningkatnya PAD Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mendapat kontribusi hampir 70 persen dari penerimaan pajak, hal ini juga mempengaruhi anggaran pendapatan belanja negara dan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah sehingga perlu ditingkatkan agar kemandirian daerah dapat terwujud (Sugianto, 2008). Salah satu penerimaan pajak daerah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah

pajak hotel, dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya pada gambar berikut ini :

Grafik 4. Penerimaan Pajak Hotel 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020 (Rupiah)



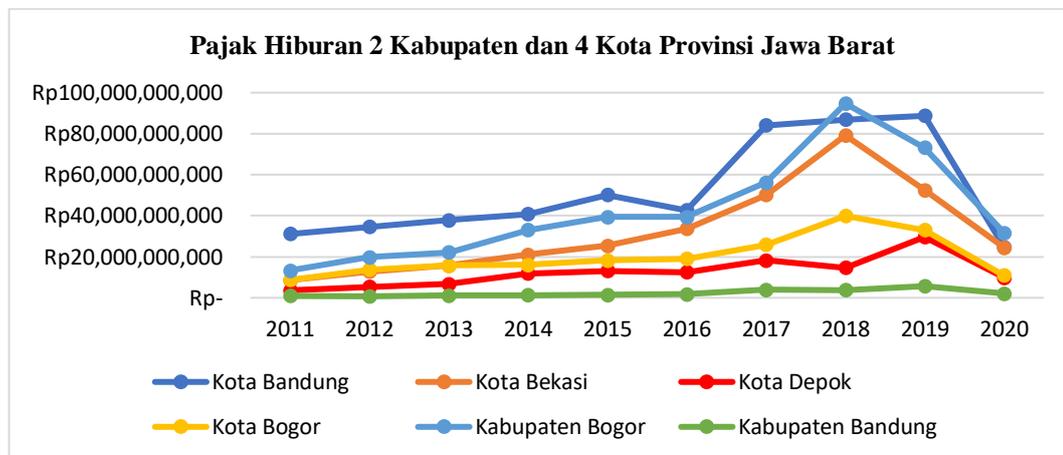
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Pada grafik 4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2016 di Kabupaten Bandung dan tahun 2020 di seluruh daerah. Penerimaan pajak hotel ditahun yang selalu meningkat, di akhir tahun periode penelitian yaitu di tahun 2018 mendapat sekitar Rp 16 Milyar sampai Rp 300 Milyar. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Barat telah berhasil mengundang wisatawan sehingga dapat meningkatkan okupansi hotel-hotel dan membuat pajak yang diterima juga meningkat. Sebagai penyumbang pajak daerah terbesar di Provinsi Jawa Barat, hal tersebut tidak tercerminkan ketika pajak hotel meningkat setiap tahun tetapi PAD yang diterima di tahun 2018 menurun hampir di semua daerah, begitupun penurunan pajak hotel di Kabupaten Bandung tahun 2016, PAD yang diterima di tahun 2018 di Kabupaten Bandung meningkat. Sedangkan tahun 2020, penurunan pajak hotel disebabkan oleh adanya imbauan untuk *stay at home* oleh pemerintah untuk pencegahan virus Covid-19 (Suherlan, 2016).

Meningkatnya pajak hotel tetapi PAD yang diterima menurun, bertolak belakang dengan Teori Pigou yang mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hotel dapat meningkatkan PAD yaitu dari pungutan pemerintah karena adanya eksternalitas positif dari proses adanya transaksi penyediaan dan atau pertukaran barang publik.

Penyumbang pajak daerah terbesar setelah pajak hotel di Provinsi Jawa Barat yaitu pajak hiburan, ini terjadi karena indentitas Provinsi Jawa Barat saat ini dikenal dengan provinsi pariwisata sehingga semakin banyaknya tempat hiburan maupun hotel yang terdapat di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah gambaran dari grafik penerimaan pajak hiburan di 2 Kabupaten dan 4 Kota Provinsi Jawa Barat:

Grafik 5. Penerimaan Pajak Hiburan 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020 (Rupiah)



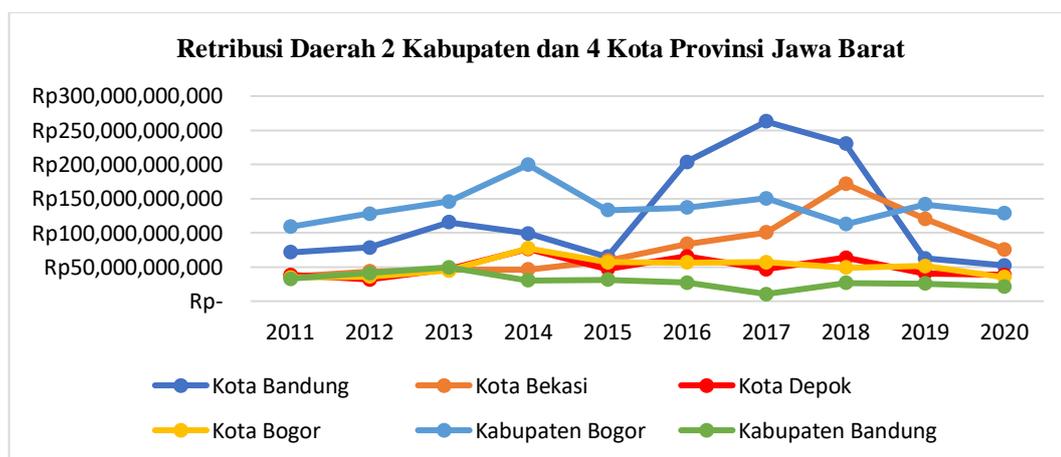
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Pada grafik 5, penerimaan pajak hiburan terus meningkat di daerah kecuali di tahun 2016, 2018 dan 2020. Tahun 2016 Pajak Hiburan menurun di Kota Bandung dan Kota Depok sekitar Rp 10 Milyar karena adanya kenaikan tarif pajak hiburan yang mencapai 35% sehingga komunitas tempat hiburan menunda pembayaran pajaknya sampai diturunkan menjadi 15% karena tempat hiburan yang terdampak oleh pengurangan jam operasional oleh Polda Jabar. Selanjutnya di tahun 2018 Kabupaten Bandung dan Kota Depok yang turun sekitar Rp 2 sampai 4 Milyar disebabkan kurangnya pengawasan pada pemungutan pajak hiburan (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016). Lalu ditahun 2020 seluruh daerah mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan karena adanya Covid-19 yang membuat pemerintah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pada saat diterapkannya ppkm, tempat usaha selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tidak diizinkan beroperasi, salah satunya tempat hiburan seperti bioskop, mall dan objek wisata lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan laju Covid-19.

Turun naiknya pajak hiburan terdapat perbedaan dengan Teori yang dikemukakan Pigou. Seperti pajak hotel, pajak hiburan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan pungutan dari pemerintah atas penyediaan barang publik serta timbulnya eksternalitas positif yang disebabkan oleh transaksi penyediaan barang publik. Oleh karena itu seharusnya ketika pajak hiburan naik, PAD juga naik, begitupun sebaliknya. Faktanya ketika pajak hiburan di Kota Bandung turun di tahun 2016, PAD yang diterima ditahun 2016 meningkat dan pajak hiburan daerah lainnya yang naik ditahun 2018, PADnya malah menurun.

Selain pajak daerah, terdapat retribusi daerah sebagai faktor yang mempengaruhi PAD karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD terbesar setelah pajak daerah di Provinsi Jawa Barat. Grafik 6 menunjukkan penerimaan retribusi daerah :

Grafik 6. Penerimaan Retribusi Daerah 4 Kota dan 2 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020 (Rupiah)



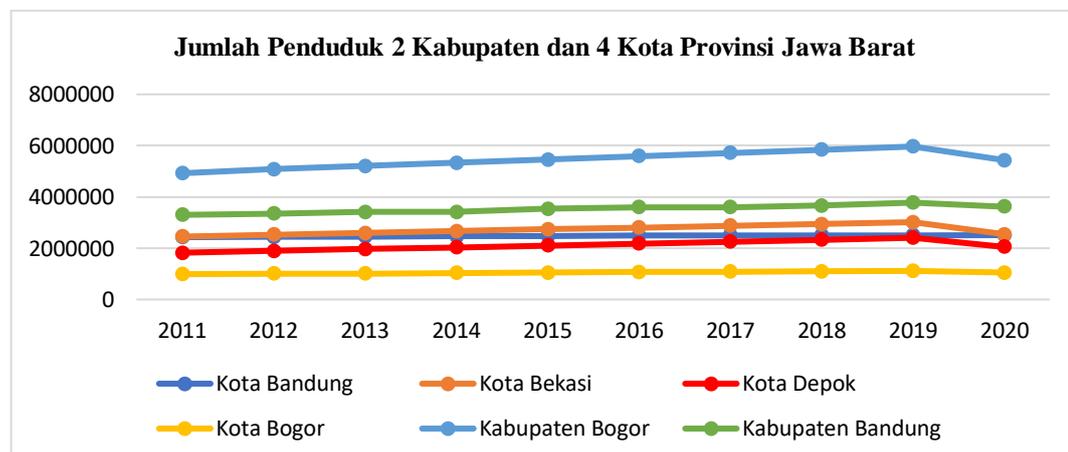
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Retribusi yang tidak terlalu difokuskan juga menjadi masalah untuk PAD Jawa Barat sehingga pemungutan retribusi daerah juga menjadi tidak maksimal, padahal pada beberapa daerah retribusi justru menjadi sumber terbesar untuk pendapatan daerahnya. Data yang menunjukkan penerimaan retribusi daerah pada grafik 6, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi tidak stabil di tiap tahunnya. Penerimaan retribusi daerah juga menurun sangat tajam pada tahun 2015, ini disebabkan oleh banyaknya usaha ritel yang belum melengkapi berkas perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya pengawasan pada retribusi daerah.

Penerimaan retribusi daerah yang tidak stabil sangat tidak mencerminkan teori yang dikemukakan Pigou, yaitu retribusi daerah dapat meningkatkan PAD karena adanya pungutan pemerintah atas penyediaan barang publik, nyatanya ketika retribusi daerah berfluktuasi setiap tahunnya, PAD yang diterima setiap tahunnya tetap meningkat, padahal retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar PAD setelah pajak daerah.

Selain berasal dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, secara langsung maupun tidak langsung PAD juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, karena jumlah penduduk yang meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat sehingga tingginya pendapatan seseorang dinyatakan mampu orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah dan hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Hasanur & Putra, 2017). Berikut grafik 7 untuk menggambarkan jumlah penduduk 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020.

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Penduduk dari 2 Kabupaten dan 4 Kota Provinsi Jawa Barat 2011-2020 (Jiwa)



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Melihat dari grafik 7, jumlah penduduk dari daerah yang diteliti walaupun tidak mengalami perubahan yang besar tetapi selalu meningkat sekitar 58.527 Jiwa disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya angka kelahiran yang mencapai lebih dari 9 sampai 100 ribu jiwa disetiap daerah di Jawa Barat. Selain banyaknya angka kelahiran, banyaknya jumlah imigran di Jawa Barat juga

mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk, artinya Provinsi Jawa Barat dipercaya masyarakat dapat memberikan peluang serta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan sehingga banyak penduduk yang berpindah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2019).

Meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2011-2020 seharusnya membuat PAD yang didapat juga meningkat, tetapi pada tahun 2018 PAD yang diterima hampir setiap daerah yang diteliti justru menurun yaitu sekitar Rp 151 Milyar, sehingga bertolak belakang dengan teori barang publik Pigou yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi PAD dengan dipungutnya pajak dan retribusi atas penyediaan barang publik, karena ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin besar *public good* yang harus disediakan pemerintah sehingga semakin banyak pula pemungutan pajak dan retribusi atas penyediaan barang publik tersebut dan hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa penelitian mencoba melihat pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memfokuskan hubungan variabel-variabel tersebut dan pengaruhnya terhadap PAD. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh (Ariyani, Yetti, & Lastiningsih, 2018) dengan hasil variabel Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD, kemudian penelitian oleh (Kurniawan & Rizki, 2019) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan penelitian yang dilakukan oleh (Sudarmana & Sudiarta, 2020) menyatakan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahmid & Wahyudi, 2018) menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2017) menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Pramartha & Aswitari, 2018) menyatakan bahwa variabel Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.

Dari uraian di atas membuktikan bahwa terdapat kontradiksi antar hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan adanya

penelitian ini menjadi titik terang dari perbedaan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat*”.

I.2 Perumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung ditentukan oleh pajak hotel, pajak hiburan, retribusi daerah dan jumlah penduduk. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir terus meningkat dan persentase penduduk usia produktif mencapai 70 persen sehingga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan PAD yang diperoleh dari pendapatan seseorang sehingga pajak dan retribusi dapat terbayarkan. Ketika jumlah penduduk meningkat, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya terkait inovasi, penerimaan pajak daerah masih belum sesuai target dan penerimaan retribusi daerah tidak stabil karena dalam segi pelayanan hotel masih kurang dan tempat hiburan yang masih terbatas, sehingga memengaruhi kinerja PAD.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas:

- a. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat?
- b. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat?
- c. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat?
- d. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat?
- e. Bagaimana pengaruh variabel dummy 2 Kabupaten dan 4 Kota terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan deskripsi atau karakteristik Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pajak daerah, retribusi daerah

serta jumlah penduduk. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis variabel pada penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat
- b. Menganalisa pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat
- c. Menganalisa pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat
- d. Menganalisa pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat
- e. Menganalisa pengaruh variabel dummy yang terdiri dari 2 Kabupaten dan 4 Kota terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai pajak hotel, pajak hiburan, retribusi daerah dan jumlah penduduk yang mempengaruhi PAD serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang peneliti dapatkan selama di dalam bangku perkuliahan.

- b. Manfaat Empiris

Penelitian ini secara empiris dapat membantu suatu daerah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi PAD. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan yang didapat pada suatu daerah, khususnya PAD.

- c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebagai salah satu bentuk bahan evaluasi dan gambaran mengenai pengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam mengetahui pajak hotel, pajak hiburan,

retribusi daerah dan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi PAD serta dapat menjadikan kontribusi dalam pengembangan teori dan sebagai bahan acuan mengenai faktor-faktor yang Pendapatan Asli Daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, retribusi daerah dan jumlah penduduk bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini.